

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PEMERINTAHAN DESA
PER BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020**

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

PP/Perpres/Permen/Peraturan LKPP

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1100);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500),

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

Perda/Perbup

30. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38), sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 92), kemudian diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan Di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 196);
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 218);
32. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 266);
33. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 267);
34. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 258);
35. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjukan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 524) sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Petunjukan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 867);
36. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 558) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 766);
37. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 621) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 869);
38. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Bersama Membangun Ekonomi Rakyat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 669);
39. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 678);

40. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 721);
41. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Berskala Kecil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 762);
42. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 775);
43. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 770), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 907);
44. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 788);
45. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 811);
46. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas dan Jam Kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 821);
47. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 826);
48. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 872);
49. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 874) sebagaimana telah beberapa kali diubah Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 924);
50. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 890);
51. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penerima Manfaat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 914), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penerima Manfaat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 947);